

KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN DALAM UPAYA MENGHADAPI KRISIS EKONOMI INDONESIA

Oleh :
Novita Mariana

1. KONDISI PEREKONOMIAN SAAT INI

Seperti telah kita ketahui dan rasakan bersama, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami cobaan sangat berat berupa krisis ekonomi yang telah mengganggu berbagai sendi kestabilan perekonomian nasional. Dampak dari krisis ini telah berpengaruh banyak pada menurunnya kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sampai dengan pertengahan tahun 1998 ini, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai kendala untuk pulih dari krisis moneter yang muncul sejak pertengahan tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi nasional, yang sampai pertengahan tahun lalu sangat mengesankan dan banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, kini merosot tajam dan bahkan diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar. Sampai pertengahan tahun ini pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mengalami kontraksi sekitar 16%. Di sisi lain, laju inflasi mengalami kenaikan yang sangat cepat sehingga semakin memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Laju inflasi bulan September 1998 tercatat sebesar (.....%) atau secara *year to date* selama Januari-September telah mencapai (.....%). Laju inflasi pada tahun ini melonjak sangat besar dibandingkan dengan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengangguran juga terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengurangi atau menghentikan kegiatan usahanya.

Dilihat dari sisi permintaan, melambatnya pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Melemahnya konsumsi rumah tangga merupakan cerminan dari menurunnya daya beli masyarakat akibat dari peningkatan laju inflasi yang disertai dengan menurunnya

pendapatan masyarakat. Sementara itu, menurunnya kegiatan investasi swasta merupakan dampak dari melemahnya permintaan yang disertai dengan peningkatan biaya produksi dan kesulitan keuangan yang dihadapi sektor usaha sehubungan dengan merosotnya nilai tukar, tingginya suku bunga, dan kesulitan mendapatkan kredit perbankan.

Di sisi penawaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada sektor yang memiliki pangsa besar dalam PDB yaitu sektor industri pengolahan, pertambangan, bangunan dan perdagangan serta jasa-jasa. Peningkatan biaya impor bahan baku dan pembayaran hutang yang jatuh tempo akibat tekanan nilai tukar serta ketatnya kredit perbankan merupakan beberapa kendala yang dihadapi di sisi penawaran. Tingginya laju inflasi terutama disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah (*imported inflation*) dan kelangkaan pasokan (*supply shortage*) khususnya sembilan bahan pokok. Kenaikan harga yang cukup tinggi terutama pada kelompok makanan yang merupakan salah satu penyumbang tingginya angka inflasi. Dapat ditambahkan bahwa tingginya angka inflasi juga dipacu oleh peningkatan permintaan kebutuhan pokok sehubungan dengan ketidakpastian pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah masih tetap lemah. Dewasa ini kurs rupiah di pasar valas berada di sekitar Rp11.000 per dollar, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini cenderung menguat. Gejala yang berkepanjangan berkaitan dengan merosotnya kepercayaan investor asing yang tercermin dari tingginya tekanan arus modal keluar, baik dalam rangka pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo maupun kegiatan spekulatif. Sebagian lain terkait dengan memburuknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, terutama munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan meningkatnya laju inflasi. Untuk memperkuat kembali nilai tukar Rupiah maka Bank Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat melalui peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan suku bunga SBI yang tinggi, disamping akan menarik *capital inflow* dari luar negeri, juga diharapkan akan menyerap Rupiah sehingga masyarakat tidak berspekulasi dengan membeli USD ataupun memborong barang-barang secara berlebihan. Akan tetapi, ketidakstabilan situasi sosial dan politik di dalam negeri

serta krisis ekonomi regional Asia dan terus menguatnya USD merupakan faktor utama yang mengakibatkan nilai tukar Rupiah tetap melemah.

Surplus ini disebabkan oleh peningkatan ekspor nonmigas dan penurunan impor migas dan nonmigas yang relatif besar, sementara jasa-jasa mengalami perubahan yang relatif kecil. Peningkatan ekspor nonmigas menunjukkan bahwa kinerja produk ekspor Indonesia masih cukup baik walaupun dalam situasi krisis. Impor mengalami penurunan akibat dari relatif mahalnya harga barang impor berkaitan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, di samping menurunnya berbagai kegiatan investasi dan konsumsi serta kesulitan dalam membuka *letter of credit* (L/C). Seiring dengan telah diterimanya bantuan dari lembaga-lembaga internasional, lalu lintas modal telah menunjukkan surplus sebesar USD 1,1 miliar. Dari sisi modal swasta, defisit lalu lintas modal swasta semakin menurun disebabkan turunnya penanaman modal asing dan penerimaan pinjaman luar negeri di luar perbankan, di samping meningkatnya arus modal swasta keluar dalam bentuk pelunasan surat-surat berharga domestik yang dimiliki asing dan pembayaran hutang luar negeri, baik perbankan dan non perbankan.

Perbankan nasional merupakan sektor yang mengalami krisis berat akibat dari gejolak nilai tukar dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Melemahnya nilai tukar Rupiah telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang diperberat dengan lemahnya kondisi internal perbankan nasional, terutama sebagai dampak dari lemahnya manajemen, konsentrasi kredit yang berlebihan, *moral hazard*, dan kurang transparannya informasi keuangan bank. Kondisi perbankan menjadi semakin berat akibat terjadinya penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian meningkat, kecukupan likuiditas dan permodalan perbankan menurun drastis dan ketergantungan kepada bantuan likuiditas dari Bank Indonesia naik tajam.

Berbagai perkembangan ini mengakibatkan proses intermediasi perbankan terganggu sehingga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pada akhir Januari 1998 pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaminan pembayaran

atas kewajiban bank-bank umum nasional kepada deposan dan kreditur dalam dan luar negeri. Program jaminan ini perlu dilakukan sampai dengan terbentuknya skim asuransi deposito. Langkah itu diikuti dengan dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melakukan penyehatan dan merestrukturisasi bank-bank yang bermasalah.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian saat ini masih dihadapkan dengan berbagai kendala yang antara lain yang bersifat non ekonomi seperti kondisi sosial politik. Seiring adanya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi di segala bidang setelah pergantian pimpinan nasional, maka negara Indonesia dihadapkan pada ketidakseimbangan baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini berdampak pada sikap pelaku ekonomi yang cenderung *'wait and see'* sehingga memperberat upaya untuk segera memulihkan perekonomian nasional.

2. TANTANGAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI

Tantangan Perekonomian Yang Mendesak

Dengan memperhatikan berbagai kecenderungan yang terjadi hingga dewasa ini, perekonomian Indonesia dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan menghadapi tantangan-tantangan berat.

Pertama, bagaimana menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang wajar dan meredam tingginya laju inflasi untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. Depresiasi rupiah yang berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas kepada perekonomian dalam negeri, khususnya kegiatan usaha yang hanya bersifat *inward looking*. Kegiatan investasi dan perdagangan internasional semakin terhambat, tekanan inflasi terus meningkat, dan beban utang luar negeri semakin berat. Perkembangan ini dikhawatirkan akan memberikan kontraksi yang lebih dalam terhadap perekonomian.

Kedua, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, terhadap perbankan nasional. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan

penarikan dana secara besar-besaran akan semakin mempersulit proses penyehatan perbankan dan mendorong kenaikan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, keengganan pihak luar negeri melakukan transaksi dengan perbankan nasional akan mempersulit usaha-usaha memobilisasi dana luar negeri dan menghambat kegiatan perdagangan internasional. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pada gilirannya akan mengganggu proses intermediasi sehingga pengaliran dana ke sektor-sektor produksi dapat terhenti. Akibatnya, kegiatan perekonomian yang dewasa ini telah sangat menurun akan semakin memburuk dalam waktu-waktu mendatang.

Ketiga, bagaimana mendorong kembali kegiatan dunia usaha untuk membatasi kontraksi yang lebih dalam pada perekonomian. Sebagai akibat krisis moneter, dunia usaha mengalami tekanan yang sangat berat. Beberapa sektor ekonomi telah mengalami penurunan produksi dan bahkan penghentian aktivitas. Hal ini berakibat pada semakin menurunnya kegiatan ekonomi dan mendorong angka pengangguran, serta memperbesar jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai perkembangan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Keempat, bagaimana mengurangi penderitaan penduduk miskin dari dampak krisis melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Memburuknya kinerja perekonomian telah berdampak negatif pada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Inflasi yang tinggi diikuti oleh meningkatnya pengangguran mendorong munculnya keresahan sosial di beberapa tempat di tanah air. Kondisi ini diperburuk oleh kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman rawan pangan.

Strategi Umum Yang Ditempuh

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kondisi perekonomian yang semakin memburuk, selama ini telah ditempuh berbagai langkah kebijakan baik di bidang moneter, perbankan, fiskal maupun di sektor riil yang dituangkan dalam program stabilisasi dan reformasi ekonomi yang menyeluruh. Program penyehatan ekonomi tersebut juga telah mendapat

dukungan dari dunia internasional, khususnya Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Bank pembangunan Asia. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, termasuk permasalahan sosial politik yang belum reda, berbagai langkah kebijakan tersebut belum dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Kompleksitas permasalahan tersebut telah menempatkan para pengambil keputusan baik Pemerintah, Bank Indonesia, maupun dunia usaha pada pilihan kebijakan yang sangat sulit. Dari sisi moneter, pilihan kebijakan yang tersedia menjadi sangat terbatas. Upaya untuk memulihkan stabilitas moneter, khususnya inflasi yang tinggi dan kurs Rupiah yang terus melemah, harus dilakukan melalui pengetatan jumlah uang yang beredar dengan implikasi suku bunga nominal yang tinggi. Namun, disadari bahwa upaya stabilisasi moneter ini dalam jangka pendek kurang dapat mendukung kegiatan dunia usaha dan kurang mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, disadari pula bahwa upaya tersebut dapat mengganggu stabilitas di bidang perbankan. Krisis kepercayaan yang dihadapi oleh industri perbankan telah menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas dan terganggunya intermediasi perbankan dalam mendukung perekonomian.

Pada sisi yang lain, upaya untuk mengurangi dampak krisis terhadap kemiskinan harus dilakukan melalui dua strategi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu : meredam tingginya laju inflasi dan penyediaan jaring sosial. Dengan terkendalinya laju inflasi, penurunan daya beli masyarakat yang lebih besar dapat dihindarkan sehingga masyarakat dapat terlindungi dari membungungnya harga-harga. Sementara penyediaan jaring pengaman sosial memerlukan alokasi pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk berbagai subsidi seperti pangan, BBM, listrik, pupuk, dan obat-obatan. Kebutuhan dana untuk subsidi ini sangat besar, sementara penerimaan negara menurun seiring dengan kontraksi perekonomian. Subsidi tersebut tidak dapat dibiayai melalui pencetakan uang karena hal ini akan berdampak pada peningkatan laju inflasi. Dengan demikian, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial harus diupayakan bersumber dari dana luar negeri, khususnya dari lembaga-lembaga internasional.

Oleh karena itu, prioritas pemecahan permasalahan serta koordinasi antar kebijakan menjadi sangat penting. Dalam hubungan ini, fokus perhatian lebih diarahkan pada tiga permasalahan mendesak dewasa ini, yaitu :

1. Upaya meredam tingginya laju inflasi dan belum stabilnya nilai tukar rupiah agar proses pemulihan ekonomi dan kegiatan dunia usaha/investasi dapat dipercepat;
2. Upaya untuk mengurangi dampak negatif dari krisis terhadap masyarakat kecil;
3. Upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat segera normal kembali.

Langkah-langkah untuk mengatasi tiga permasalahan mendesak tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan moneter dan perbankan. Koordinasi antara kebijakan moneter dan perbankan, di satu sisi, dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, di sisi lain, menjadi persyaratan bagi kelangsungan upaya-upaya stabilisasi ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan sosial politik yang sangat cepat sangat berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan di bidang ekonomi. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan dalam upaya pemulihan ekonomi juga akan dapat mendukung stabilitas sosial politik. Dengan demikian sangat diperlukan pemahaman dari semua pihak akan pentingnya kerjasama yang saling mendukung ke arah terciptanya suatu stabilitas baik di bidang sosial, politik dan ekonomi untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional.

Kerangka Kebijakan Makroekonomi

Program stabilisasi dan reformasi ekonomi yang didukung oleh IMF sesuai dengan kesepakatan tanggal 24 Juni 1998 memprakirakan kegiatan perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam pada triwulan I 1998/99 (April-Juni) sebelum berangsur-angsur membaik pada triwulan selanjutnya. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan negatif 12,1% dalam tahun 1998. Laju inflasi melonjak hingga mencapai 80% dalam tahun 1998, namun diharapkan berangsur-angsur

menjadi lebih stabil terutama sejak triwulan III 1998/99. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan dapat menguat menjadi sekitar Rp10.000 per USD.

Berbeda dengan program sebelumnya, sasaran utama dari program pemulihan ekonomi kali ini dititikberatkan pada pemberian rangsangan dari sisi fiskal untuk mengurangi dampak negatif dari krisis terutama pada masyarakat kecil. Upaya ini dilakukan dengan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berupa penyediaan anggaran pengeluaran pemerintah dalam rangka subsidi pangan, BBM, listrik, dan pupuk yaitu mencapai Rp58,8 triliun atau 6,2% dari PDB. Dengan program ini, defisit anggaran dalam tahun 1998/99 akan mencapai sekitar Rp81 triliun atau 8,5% dari PDB. Hampir seluruh defisit anggaran tersebut akan dibiayai oleh sumber dana dari luar negeri.

Disamping dorongan melalui kebijakan fiskal, upaya untuk mengurangi kontraksi yang terjadi dalam perekonomian juga didukung oleh kebijakan kredit melalui penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) secara selektif untuk penyediaan pangan, pengembangan usaha kecil dan koperasi. Sementara itu, kebijakan moneter yang ketat tetap akan ditempuh dengan intervensi di pasar uang dan pasar valuta asing secara terbatas untuk menjaga agar jumlah uang beredar tidak memberikan tekanan pada laju inflasi dan nilai tukar. Hal ini dilakukan agar sasaran-sasaran makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar) yang diinginkan tetap tercapai tanpa memberikan beban yang terlampau berlebihan kepada kebijakan moneter.

3. KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN

Secara rinci langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia dewasa ini dan dalam di masa mendatang diarahkan kepada tiga hal sebagai berikut.

Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk meredam tingginya laju inflasi dan mencapai kestabilan nilai tukar Rupiah. Untuk itu, tingkat suku bunga nominal yang tinggi untuk sementara masih akan dipertahankan. Tingkat suku bunga ini selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian yang terjadi. Disadari bahwa tingginya tingkat suku bunga tersebut belum mampu mendorong apresiasi Rupiah karena

faktor-faktor non-ekonomi di dalam negeri, krisis ekonomi regional, dan terus menguatnya mata uang dollar. Akan tetapi, menurunkan suku bunga pada saat ini mempunyai risiko yang besar. Dalam situasi dimana nilai tukar masih melemah dan laju inflasi yang sangat tinggi (*hyper-inflation*), penurunan suku bunga akan lebih memperlemah nilai tukar, mendorong penarikan dana dari sektor perbankan, mendorong laju inflasi lebih tinggi lagi, dan pada gilirannya akan semakin memperburuk situasi perekonomian.

Dalam rangka pengendalian moneter, Bank Indonesia telah menyempurnakan pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) agar lebih efektif. Kelemahan yang terjadi sekarang ini adalah pasar lelang SBI relatif lebih kecil sehingga suku bunga hasil lelang SBI pun kurang mencerminkan suku bunga pasar; kurang berperannya *primary dealer*; dan kurang berkembangnya pasar sekunder SBI sehingga SBI kurang memasyarakat. Kelemahan ini akan diatasi dengan memperbaiki mekanisme lelang SBI antara lain dengan menghapuskan *primary dealer* sehingga mekanisme lelang bersifat langsung; menggunakan sistem target kuantitas; dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki SBI. Dengan mekanisme ini maka diharapkan volume lelang SBI akan menjadi lebih besar sehingga suku bunga yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Langkah ini juga diharapkan untuk meningkatkan peranan pasar sekunder surat-surat berharga dalam upaya mendorong pengembangan pasar utang dalam negeri.

Langkah kebijaksanaan moneter juga akan diperkuat dengan strategi dan manajemen utang luar negeri yang lebih berhati-hati. Melalui kedua upaya tersebut dan dengan terbentuknya *Indonesia Debt Restructuring Agency* (INDRA) sebagai hasil dari *Kesepakatan Frankfurt*, diharapkan tekanan terhadap Rupiah guna pembayaran utang luar negeri menjadi berkurang dan kepercayaan luar negeri berangsur-angsur pulih. Sebagaimana diketahui, kesepakatan tersebut antara lain mencakup penjadwalan kembali utang swasta (*corporate debt*), penundaan pembayaran utang perbankan (*bank debt*), dan penyediaan pembiayaan perdagangan (*trade financing*) untuk keperluan impor Indonesia. Dalam hubungan dengan INDRA, Bank Indonesia terus membantu agar upaya penyelesaian kewajiban luar negeri, khususnya utang perbankan dan pembiayaan perdagangan, dapat berjalan sesuai dengan

yang telah disepakati. Dengan demikian, aliran modal masuk dari luar negeri, khususnya yang bersifat investasi langsung, diharapkan dapat normal kembali untuk mendukung kemantapan neraca pembayaran dan pemulihan perekonomian nasional.

Sementara itu, dalam kaitan dengan utang swasta dalam negeri khususnya utang-utang yang diberikan oleh perbankan nasional, Pemerintah telah mencanangkan Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative*). Program ini dilaksanakan melalui negosiasi antara perusahaan sebagai debitur dengan para krediturnya, baik kepada kreditur dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator dan mendorong agar program ini dapat berjalan dengan cepat. Dengan melihat cakupan kredit dalam program ini yang meliputi kredit dalam dan luar negeri, maka diharapkan akan lebih melancarkan kebijakan penyehatan perbankan dan penerapan skim INDRA.

Kedua, Bank Indonesia akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Menyikapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang telah demikian beratnya, Bank Indonesia memutuskan untuk memusatkan perhatian pada sektor-sektor yang paling terkena dampak negatif dari krisis ekonomi, khususnya para petani produsen pangan dan pengusaha kecil. Langkah ini diambil karena didorong oleh keyakinan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kinerja sisi penawaran yang diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari kelangkaan pasokan dan terganggunya distribusi bahan-bahan pokok. Selain itu, langkah ini juga ditempuh karena didorong oleh kenyataan bahwa sektor pertanian dan usaha kecil tersebut merupakan sektor yang bersifat padat karya, sehingga dapat menampung jumlah tenaga kerja yang lebih banyak.

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mulai menyempurnakan skim-skim perkreditan yang sudah ada serta menciptakan skim-skim usaha kecil yang baru. Upaya ini akan disertai dengan peningkatan penyediaan KLBI dengan suku bunga yang relatif rendah untuk persediaan dan distribusi pangan, petani, usaha kecil dan koperasi dalam tahun anggaran 1998/99 ini. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam membiayai usaha kecil di pedesaan, Bank Indonesia akan memperluas penyediaan KLBI tersebut dengan memanfaatkan pola keda sama dengan BPR, termasuk BPR atas

dasar prinsip bagi hasil. Berbagai skim ini juga diharapkan dapat mendorong kegiatan investasi di usaha kecil dan pedesaan.

Ketiga, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan perbankan pada upaya pemulihan kepercayaan masyarakat _baik domestik maupun internasional_ terhadap sistem perbankan nasional. Dalam hubungan ini, untuk menjamin keamanan simpanan masyarakat pada perbankan, Bank Indonesia tetap mendukung pelaksanaan program penjaminan Pemerintah atas kewajiban pembayaran bank-bank berbadan hukum Indonesia, termasuk BPR.

Untuk mendukung upaya pemulihan kepercayaan terhadap perbankan tersebut, langkah-langkah reformasi di bidang perbankan yang lebih menyeluruh terus ditingkatkan dan dipercepat. Pelaksanaan reformasi perbankan tersebut dilakukan melalui empat program utama, yaitu:

1. Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mendorong merger antarbank
2. Menyempurnakan lebih lanjut pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya memperbaiki kondisi internal perbankan
3. Memperkuat fungsi pengawasan perbankan khususnya dalam penegakan ketentuan dan undang-undang yang berlaku
4. Menyempurnakan perangkat hukum yang meliputi RUU Perbankan dan pendirian lembaga asuransi simpanan.

Sebagai bagian penting dari langkah restrukturisasi dan penyehatan perbankan, pada tanggal 21 Agustus 1998 secara khusus Pemerintah telah mencanangkan Program peningkatan modal (rekapitalisasi) bagi bank-bank yang dinilai masih mempunyai prospek untuk hidup dan terus berkembang. Program peningkatan modal ini didahului dengan kegiatan *due diligence* yang melibatkan auditor asing. Potret kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan akan dapat diketahui sampai akhir Oktober 1998. Atas dasar *due diligence* tersebut, bank-bank akan dikategorikan dalam tiga kelompok bank berdasarkan rasio kecukupan modalnya. Secara bertahap Bank Indonesia akan membicarakan hasil

pemeriksaan kepada masing-masing bank untuk diambil kesepakatan langkah-langkah penyehatan yang diperlukan untuk dituangkan dalam *business plan*.

Selanjutnya untuk mendukung proses restrukturisasi perbankan terutama dalam mengelola dan menyelesaikan kredit-kredit bermasalah (*non performing loan*) serta aset lain yang timbul dari proses restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan oleh BPPN, telah dibentuk AMU (*Asset Management Unit*). Lembaga yang merupakan salah satu divisi dari BPPN ini akan mengelola aset bermasalah dengan cara paling efisien untuk memaksimalkan nilai pengembaliannya.

Meskipun disadari bahwa hasil positif dari upaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan ini belum dapat dinikmati segera, langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Bank Indonesia juga akan secara konsisten menegakkan ketentuan hukum di bidang perbankan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana dari pemilik atau pengurus bank yang terjadi pada bank-bank yang telah dilikuidasi kepada pihak Kepolisian untuk penyelesaian lebih lanjut. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari langkah penyelesaian dari bank-bank yang termasuk dalam Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Take Over (BTO), Pemerintah telah mensyaratkan pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima bank serta pelanggaran atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam upaya peningkatan ekspor, peran perbankan akan lebih dirangsang khususnya dalam kondisi sekarang ini dimana sebagian kegiatan ekspor-impor mengalami hambatan yang disebabkan kesulitan membuka L/C khususnya untuk impor. Mengingat kesulitan ini terletak pada risiko komersial yang dihadapi maka sedang diupayakan penyelesaian terhadap risiko ini khususnya dengan melibatkan pihak asuransi dan Pemerintah. Untuk ini Pemerintah telah menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan 21 bank nasional yang memungkinkan hambatan dalam hal pembukaan L/C impor untuk bahan baku produk ekspor dapat dihilangkan melalui mekanisme penanggungans risiko komersial dari pembukaan L/C oleh eksportir nasional. Diharapkan kesepakatan ini akan menggerakkan kembali sektor riil terutama industri ekspor; memberdayakan eksportir

dalam melancarkan kegiatan usahanya dalam rangka pemulihan dan normalisasi perekonomian; dan meningkatkan citra perbankan nasional.

Dalam jangka yang lebih panjang, langkah-langkah kebijakan perbankan yang ditempuh akan tetap diarahkan pada penataan industri perbankan agar mampu berkembang secara sehat, efisien dan handal dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hubungan ini, di samping upaya-upaya restrukturisasi perbankan yang telah dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia sedang mengkaji kembali berbagai aspek pengembangan sistem perbankan nasional. Aspek-aspek tersebut terutama berkaitan dengan struktur industri perbankan, aspek perijinan, ketentuan kehati-hatian, sistem pengawasan perbankan, serta mekanisme penanganan bank-bank bermasalah. Upaya untuk meningkatkan transparansi mengenai kondisi keuangan perbankan juga akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pasar dalam menilai kinerja perbankan.

4. KESIMPULAN

Berbagai langkah yang tengah dan akan ditempuh oleh Bank Indonesia seperti dikemukakan di atas akan diperkuat dengan upaya memperbarui Undang-undang tentang Bank Indonesia. Dalam RUU Bank Indonesia yang sekarang masih dalam proses pembahasan intensif secara intern tersebut akan termuat konsep independensi atau otonomi bank sentral. Dalam kaitan ini, kami berpendapat bahwa independensi Bank Indonesia sama sekali tidak akan mengubah tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral karena di negara manapun tujuan bank sentral senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Independensi tersebut akan lebih mengarah pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pilihan instrumen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berbagai upaya di atas akan dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai kesepakatan internasional. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, Bank Indonesia akan terus menjalin kerjasama dengan lembaga internasional, termasuk IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat kerjasama dengan bank-bank sentral lainnya, khususnya di tingkat regional.

Kita menyadari bahwa berbagai permasalahan yang tengah dan akan kita hadapi di masa-masa mendatang demikian berat dan panjang. Akan tetapi, kita harus percaya bahwa kunci keberhasilannya berada di tangan kita sendiri, pada keseriusan langkah-langkah yang kita ambil secara konsisten dan berkesinambungan, pada keyakinan akan kemampuan kita bersama dalam memusatkan semua perhatian dan tenaga ke arah pemecahan masalah yang kita hadapi, dan pada kebersamaan kita untuk berbagi beban seadil-adilnya di antara kita untuk melaksanakan apapun yang perlu dilakukan untuk mengentaskan bangsa ini dari krisis.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keberhasilan berbagai langkah di bidang ekonomi yang telah dan terus ditempuh dalam mengatasi krisis tersebut akan dipengaruhi oleh perkembangan di bidang sosial dan politik. Demikian sebaliknya, keberhasilan upaya pemulihan ekonomi juga akan mendukung stabilitas sosial politik. Dengan demikian sangat diperlukan kesadaran dan pemahaman semua pihak akan pentingnya kerjasama yang saling mendukung ke arah terciptanya stabilitas baik di bidang sosial, politik dan ekonomi untuk memulihkan perekonomian nasional yang kita inginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Stephen M. Goldfeld, Lester V. Chandler, 1990, *Ekonomi Uang dan Bank*, Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta.
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta.
- Drs, S.P., M.A., Iswardono, *Ekonomi Uang & Bank*, Edisi Keempat, 1999, BPFE-Yogyakarta
- Thomas F. Dernburg, Karyaman Muchtar, *Makro Ekonomi "Konsep, Teori & Kebijakan"*, Edisi Ketujuh, 1992, Erlangga, Jakarta
- SE, M.S.Sc, Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.